

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KEPADATAN PENDUDUK DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KRIMINALITAS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ADEK OKTAVIANI EDWART
2014/14060071

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KEPADATAN PENDUDUK DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KRIMINALITAS
DI INDONESIA**

Nama : Adek Oktaviani Edwart
NIM/TM : 14060071/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Disetujui Oleh
Pembimbing



Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KEPADATAN
PENDUDUK DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP
KRIMINALITAS DI INDONESIA

Nama : Adek Oktaviani Edwart
NIM/TM : 14060071/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2021

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Drs. Zul Azhar, M.Si	1. 
2	Anggota	Melti Roza Adry, SE.ME	2. 
3	Anggota	Drs. Ali Anis, MS	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adek Oktaviani Edwart
NIM/Tahun Masuk : 14060071 /2014
Tempat / Tanggal Lahir : Koto Baru / 16 Oktober 1995
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Graha Bunga Mas Blok g no 10
No. Hp/Telephone : 082284409400
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Pada karya tulis / skripsi ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program Studi.
Demikian lah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karyatulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 2019



Adek Oktaviani Edwart
NIM : 14060071

ABSTRAK

Adek Oktaviani Edwart 14060071/2014 : Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dosen Pembimbing Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. (2) Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas di Indonesia. (3) Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. (4) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan secara bersama-sama Terhadap Kriminalitas di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 31 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat Pendidikan berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. (2) Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. (3) Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah dan pihak berwajib diharapkan agar giat melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah-daerah yang rawan akan tindak kriminalitas. Dan juga melaksanakan program pemerataan pembangunan serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan izin Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia ” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penulis menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Teristimewah kepada Orang Tua tercinta, terutama Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, bantuan materi, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE. MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku dosen pembimbing, Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku dosen penguji (1) dan Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku dosen penguji (2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi tercinta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, bantuan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Induk Universitas

Negeri Padang yang telah membantu demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

8. Kak Asma Lidya, Amd yang telah membantu dan memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menyediakan data pada penelitian penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Cleaning Service serta Satpam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu menjaga kenyamanan kami selama perkuliahan.
11. Kepada Halifah Hadi, Desy Wulandari, Annisatul Husnah, Yulfia Mailida dan Desy Mariati yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan memberikan motivasi, semangat serta doanya.
12. Kepada keluarga besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah sama-sama berjuang sejak awal hingga sekarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, intinya terima kasih banyak atas bantuan dan partisipasinya dalam penulisan skripsi penulis selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua. Aminnn

Padang, Oktober 2021

Penulis

Adek Oktaviani Edwart

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	16
A. KAJIAN TEORI	16
1. Teori Kriminalitas.....	16
2. Teori Pendidikan.....	26
3. Teori Kepadatan Penduduk.....	28
4. Teori Ketimpangan Pendapatan.....	30
B. Penelitian Relevan	36
C. Kerangka Konseptual.....	39
D. Hipotesis	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Variabel Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Defenisi Operasional.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	56
1. Kondisi Geografis	56
2. Jumlah Penduduk Indonesia.....	57
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	58

1. Deskripsi Perkembangan Kriminalitas di Indonesia	59
2. Deskripsi Perkembangan Tingkat Pendidikan di Indonesia.....	63
3. Deskripsi Perkembangan Kepadatan Penduduk di Indonesia.....	66
4. Deskripsi Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	69
C. Analisis Induktif.....	72
1. Model Estimasi Model Regresi Panel.....	72
2. Uji Pemilihan Model Data Panel	73
3. Uji Asumsi Klasik.....	75
4. Uji Regresi Panel	77
5. Koefisien Determinasi.....	79
6. Pengujian Hipotesis	80
D. Pembahasan Hasil Penelitian	81
1) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap kriminalitas	82
2) Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas	83
3) Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas.....	85
BAB V	87
SIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) per 100.000 Penduduk Menurut 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	60
2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	64
3. Persentase Kepadatan Penduduk 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	67
4. Ketimpangan Pendapatan 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	70
5. Hasil Uji Chow.....	73
6. Hasil Uji Hausman.....	74
7. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	76
8. Hasil Uji Multikolonialitas.....	77
9. Hasil Uji Fixed Effect Model.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	32
Gambar 2.2 Koefisien Gini.....	33
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia.....	40
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Resiko Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	92
Lampiran 2. Hasil Uji Chow.....	96
Lampiran 3. Hasil Uji Hausman.....	96
Lampiran 4. Hasil Uji Common Effect Model (CEM).....	86
Lampiran 5. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM).....	97
Lampiran 6. Hasil Uji Random Effect Model (REM).....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kesusilaan manusia dan kadang-kadang disebut kejahatan. Kejahatan berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tergolong penyimpangan sosial yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, peraturan dan standar yang berlaku yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang disebut kejahatan dan dijelaskan oleh kriminolog dengan mempertimbangkan kondisi struktural masyarakat dalam konteks kekuasaan, otoritas, perbedaan kekayaan, dan hubungan dengan berbagai perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Saya percaya itu perlu. (Santoso, 2001).

Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kesusilaan manusia dan kadang-kadang disebut kejahatan. Kejahatan berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tergolong penyimpangan sosial yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, peraturan dan standar yang berlaku yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang disebut kejahatan dan dijelaskan oleh kriminolog dengan mempertimbangkan kondisi struktural masyarakat dalam konteks kekuasaan, otoritas, perbedaan kekayaan, dan hubungan dengan berbagai perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Saya percaya itu

perlu.Kejahatan tampaknya tidak lepas dari kehidupan sosial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penjahat dapat dengan mudah melakukan tindakan karena kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja di Indonesia, ditambah dengan pesatnya perkembangan waktu dan lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus kriminal yang saat ini menjadi sorotan. Berbagai kasus kriminal pun dilakukan mulai dari perampokan, pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan serta segala perilaku yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik pada korbannya.

Saat ini pemerintah setiap Negara di dunia berupaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas, karena kriminalitas dapat memberikan berbagai kerugian. Entah itu kerugian finansial, fisik, moral atau psikologis. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan namun nampaknya pencegahan tersebut belum bisa memberikan hasil yang signifikan. Salah satu negara yang berupaya dalam pencegahan kriminalitas ini adalah Indonesia, karena di Indonesia angka kriminalitas tergolong tinggi, dimana pada tahun 2015 *World Bank* menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ke-68 dengan Indeks Kejahatan tertinggi dari 147 negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan (*crime rate*) menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum, dimana angka kejahatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi keamanan, ketertiban dan tingkat kerawanan suatu wilayah jika dilihat secara lebih detail.

Tabel 1.1 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

No	Provinsi	Kriminalitas				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	164	193	171	169	144
2	Sumatera Utara	256	266	280	231	216
3	Sumatera Barat	317	287	248	243	208
4	Riau	155	134	103	109	99
5	Jambi	316	277	271	180	195
6	Sumatera Selatan	259	253	190	164	156
7	Bengkulu	242	315	252	175	179
8	Lampung	115	129	134	108	103
9	Kap. Bangka Belitung	140	153	135	143	136
10	Kepulauan Riau	255	248	176	164	152
11	DKI Jakarta	181	174	138	137	127
12	Jawa Barat	73	76	65	42	34
13	Jawa Tengah	48	42	35	27	30
14	DI Yogyakarta	266	227	193	179	177
15	Jawa Timur	92	74	88	67	69
16	Banten	101	92	55	54	49
17	Bali	123	115	85	76	72
18	Nusa Tenggara Barat	126	161	164	130	165
19	Nusa Tenggara Timur	133	153	127	118	111
20	Kalimantan Barat	141	153	122	118	96
21	Kalimantan Tengah	110	149	104	102	94
22	Kalimantan Selatan	174	181	160	138	130
23	Kalimantan Timur	221	219	214	176	124
24	Sulawesi Utara	328	411	324	416	302
25	Sulawesi Tengah	317	334	345	316	211
26	Sulawesi Selatan	166	154	256	255	190
27	Sulawesi Tenggara	149	150	110	49	47
28	Gorontalo	302	332	265	243	203
29	Maluku	111	152	146	144	148
30	Maluku Utara	71	94	177	158	200
31	Papua	233	257	65	60	59
Indonesia		140	140	129	113	103

Sumber : BPS, Statistik Kriminal 2019

Pada Tabel 1.1 Menunjukkan resiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) per 100.000 penduduk menurut 31 Provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2017 resiko penduduk terkena kejahatan mengalami peningkatan dari 131 per 100.000 penduduk menjadi 140 per 100.000 penduduk. Jumlah ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2016.

Pada tahun 2018 jumlah resiko penduduk terkena kejahatan tertinggi di Indonesia berada pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 416 per 100.000 penduduk, hal ini disebabkan oleh kejahatan konvensional dengan kejahatan isu paling mendasar dan sering terjadi di tengah masyarakat dan berpendidikan rendah salah satu tingginya angka kriminalitas di lingkungan yang mana orang yang memiliki pendidikan rendah dan tidak bekerja bahkan lebih bertindak kejahatan, sedangkan yang terendah berada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 30 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2015 jumlah resiko penduduk terkena kejahatan tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 328 per 100.000, sedangkan yang terendah berada pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 48 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2016 jumlah resiko penduduk terkena kejahatan tertinggi juga berada pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 411 per 100.000 penduduk hal ini disebabkan sektor pendidikan rendah dan sektor pekerjaan yang minim andaikan memiliki pekerja upah yang minim, penduduk yang berpendapatan yang rendah sehingga tingkat kriminalitas menjadi tinggi serta faktor lingkungan turut membentuk karakter seseorang. Sedangkan yang terendah juga berada pada Provinsi Jawa Tengah

yaitu sebesar 42 per 100.000 penduduk. Sehingga berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Dalam pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang seperti Indonesia, peran mutu modal sangat penting terutama dalam peningkatan kapasitas produksi khususnya yang berkaitan dengan adanya mutu modal manusia yang tinggi sehingga yang perlu ditingkatkan adalah investasi dalam modal manusia yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan.

Peranan pendidikan sangatlah strategis dan merupakan indikator utama karena mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan bahkan dijadikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat seperti diperolehnya kondisi kerja yang baik, dapat meningkatkan kesejahteraan dan penambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. Karena tanpa pendidikan, masyarakat akan cenderung kesulitan dalam menghadapi masalah masa depan dunia secara global.

Lochner (2007) Waktu luang seseorang mencerminkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah keterampilannya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi. yang hanya lulusan SD dan SMP lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan

pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Dan hal ini dapat berakibat bagi mereka yang memiliki waktu luang yang banyak dijadikan sebagai peluang untuk melakukan tindakan kriminalitas.

Berikut adalah data rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas pada 31 Provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 1.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

No	Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18
2	Sumatera Utara	9,03	9,12	9,25	9,34	9,45
3	Sumatera Barat	8,42	8,59	8,72	8,76	8,92
4	Riau	8,49	8,59	8,76	8,92	9,03
5	Jambi	7,96	8,07	8,15	8,23	8,45
6	Sumatera Selatan	7,77	7,83	7,99	8	8,18
7	Bengkulu	8,29	8,37	8,47	8,61	8,73
8	Lampung	7,56	7,63	7,79	7,82	7,92
9	Kap. Bangka Belitung	7,46	7,62	7,78	7,84	7,98
10	Kepulauan Riau	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99
11	DKI Jakarta	10,7	10,88	11,02	11,05	11,06
12	Jawa Barat	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37
13	Jawa Tengah	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53
14	DI Yogyakarta	9,0	9,12	9,19	9,32	9,38
15	Jawa Timur	7,14	7,23	7,34	7,39	7,59
16	Banten	8,27	8,37	8,53	8,62	8,74
17	Bali	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84
18	Nusa Tenggara Barat	6,71	6,79	6,9	7,03	7,27
19	Nusa Tenggara Timur	6,93	7,02	7,15	7,3	7,55
20	Kalimantan Barat	6,93	6,98	7,05	7,12	7,31
21	Kalimantan Tengah	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51
22	Kalimantan Selatan	7,76	7,89	7,99	8	8,2
23	Kalimantan Timur	9,15	9,24	9,36	9,48	9,7
24	Sulawesi Utara	8,88	8,96	9,14	9,24	9,43
25	Sulawesi Tengah	7,97	8,12	8,29	8,52	8,75

26	Sulawesi Selatan	7,64	7,75	7,95	8,02	8,26
27	Sulawesi Tenggara	8,18	8,32	8,46	8,69	8,91
28	Gorontalo	7,05	7,12	7,28	7,46	7,69
29	Maluku	9,16	9,27	9,38	9,58	9,81
30	Maluku Utara	8,37	8,52	8,61	8,72	9
31	Papua	5,99	6,15	6,27	6,52	6,65
Indonesia		7,84	7,95	8,1	8,17	8,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah 2015-2019)

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk pada 31 Provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun rata-rata pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah, hal ini diduga pola pemikiran orang tua masih pemikiran awam sehingga pendidikan untuk anaknya masih rendah, hal ini dapat dilihat pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 rata-rata pendidikan paling tinggi hanya mencapai 8,34 tahun. Ini artinya rata-rata pendidikan penduduk di Indonesia hanya sebatas tidak tamat sekolah menengah pertama. Menurut laporan HDI UNDP pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 110 dari 188 negara, pada posisi ini terdapat nilai kualitas yang sangat rendah bagi Indonesia.

Selain tingkat pendidikan, kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kejahatan. Daerah padat penduduk rentan terhadap situasi berbahaya yang mengarah pada masalah keuangan, kesejahteraan, permintaan makanan, dan kegiatan kriminal. Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu daerah, semakin sedikit kesempatan kerja yang mereka miliki, yang pada gilirannya menyebabkan pengangguran dan

kesenjangan pendapatan di antara non-pekerja, memfasilitasi kegiatan kriminal..

Sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di daerah ibu kota dan kota-kota besar lainnya yang menyebabkan daerah tersebut rentan terhadap tindakan kriminal, pelaku tindak kriminal cenderung memilih kota-kota besar dalam melakukan aksinya dikarenakan lebih banyak masyarakat golongan menengah keatas, tuntutan ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong seseorang atau kelompok tertentu dalam melakukan tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang setiap hari makin meningkat sehingga membuat sebagian orang untuk berpikir menyimpang bahkan melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku.

(Todaro, 2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas yaitu tindakan kejahatan terutama di perkotaan yang diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Perkembangan jumlah kepadatan penduduk di Indonesia menurut 31 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Persentase Kepadatan Penduduk pada 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019

No	Provinsi	Kepadatan Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	86	88	89	90	93
2	Sumatera Utara	191	193	195	200	200
3	Sumatera Barat	124	125	128	128	130
4	Riau	73	75	76	77	80
5	Jambi	68	69	70	70	72
6	Sumatera Selatan	88	89	90	91	92
7	Bengkulu	94	96	97	97	100
8	Lampung	234	237	240	243	244
9	Kap. Bangka Belitung	84	85	88	87	91
10	Kepulauan Riau	241	247	250	265	267
11	DKI Jakarta	15.328	15.478	15.015	15.704	15.9
12	Jawa Barat	1.32	1.339	1.362	1.37	1.394
13	Jawa Tengah	1.03	1.037	1.045	1.047	1.058
14	DI Yogyakarta	1.174	1.188	1.122	1.218	1.227
15	Jawa Timur	813	817	820	826	831
16	Banten	1.237	1.263	1.272	1.296	1.338
17	Bali	718	727	730	745	750
18	Nusa Tenggara Barat	260	264	271	273	273
19	Nusa Tenggara Timur	105	107	109	110	112
20	Kalimantan Barat	33	33	33	33	34
21	Kalimantan Tengah	16	17	17	17	18
22	Kalimantan Selatan	103	105	106	107	110
23	Kalimantan Timur	27	27	27	27	29
24	Sulawesi Utara	174	176	177	178	181
25	Sulawesi Tengah	47	47	48	48	49
26	Sulawesi Selatan	182	184	185	187	189
27	Sulawesi Tenggara	66	67	68	68	71
28	Gorontalo	101	102	103	103	107
29	Maluku	36	37	37	37	38
30	Maluku Utara	36	37	38	38	39
31	Papua	10	10	10	10	11
Indonesia		134	135	138	139	140

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah 2015-2019)

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa persentase kepadatan penduduk secara keseluruhan di Indonesia dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari tahun ke tahun berdasarkan 31 Provinsi di Indonesia tingkat kepadatan penduduk tertinggi selalu berada pada Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015 yaitu sebesar 15.328 ribu jiwa dan meningkat sebesar 15.900 ribu jiwa sampai dengan tahun 2019. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan luas wilayah administrasi DKI Jakarta yang tetap membuat kota Jakarta menjadi kota yang padat akan penduduk. Semakin padatnya penduduk suatu kota maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah dari tahun 2015 sampai 2019 berada pada Provinsi Papua yaitu sebesar 10 ribu jiwa.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Herpandi, 2017) menemukan hasil bahwa pertumbuhan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dan nantinya memiliki hubungan positif yang sangat tinggi dengan jumlah kriminalitas yang ada.

Faktor lain penyebab terjadinya kriminalitas diduga karena ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga memicu terjadinya tindakan kriminalitas dalam masyarakat. (Becker, 2014) tindakan kriminalitas lebih didorong oleh besarnya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di suatu daerah karena semakin besarnya frustrasi akibat ketimpangan akan memperbesar godaan untuk melakukan tindakan kejahatan. Maka ketimpangan pendapatan yang semakin besar akan

meningkatkan angka kejahatan di suatu daerah yang nantinya akan meningkatkan jumlah kriminalitas.

Selain itu, faktor yang mendorong seorang individu untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas yaitu karena rendahnya pendapatan yang didapatkan sehingga hal tersebut mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mudah dengan berasumsi bahwa dengan melakukan tindakan kriminalitas akan mendapatkan pendapatan dan kepuasan yang lebih namun tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi dikemudian hari. Seperti yang telah diteliti oleh (Hardianto, 2009)

Secara teoritis, seorang pelaku kejahatan akan merespon terhadap insentif kejahatan dengan pertimbangan rasionalitas. Kondisi kesenjangan pendapatan dalam suatu kawasan akan cenderung mendorong keputusan untuk melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan pelaku berhadapan langsung dengan korban potensial yang menyediakan ekspektasi perolehan harta rampasan yang lebih tinggi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi juga terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 yang menunjukkan angka ketimpangan pendapatan di Indonesia empat tahun terakhir.

**Tabel 1.4 Ketimpangan Pendapatan 31 Provinsi
di Indonesia Tahun 2015-2019**

No	Provinsi	Ketimpangan Pendapatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0.368	0.362	0.329	0.318	0.321
2	Sumatera Utara	0.332	0.333	0.335	0.311	0.315
3	Sumatera Barat	0.325	0.323	0.312	0.305	0.307
4	Riau	0.385	0.368	0.325	0.347	0.331
5	Jambi	0.354	0.403	0.334	0.335	0.324
6	Sumatera Selatan	0.354	0.397	0.365	0.341	0.339
7	Bengkulu	0.398	0.405	0.349	0.355	0.329
8	Lampung	0.399	0.384	0.333	0.326	0.331
9	Kap. Bangka Belitung	0.284	0.318	0.276	0.272	0.262
10	Kepulauan Riau	0.333	0.346	0.359	0.339	0.337
11	DKI Jakarta	0.421	0.397	0.409	0.39	0.391
12	Jawa Barat	0.446	0.412	0.393	0.405	0.398
13	Jawa Tengah	0.402	0.382	0.365	0.357	0.358
14	DI Yogyakarta	0.428	0.423	0.44	0.422	0.428
15	Jawa Timur	0.428	0.433	0.415	0.371	0.364
16	Banten	0.39	0.399	0.379	0.367	0.361
17	Bali	0.406	0.378	0.379	0.364	0.37
18	Nusa Tenggara Barat	0.376	0.41	0.378	0.391	0.374
19	Nusa Tenggara Timur	0.301	0.344	0.359	0.359	0.355
20	Kalimantan Barat	0.361	0.361	0.329	0.325	0.318
21	Kalimantan Tengah	0.34	0.364	0.327	0.344	0.335
22	Kalimantan Selatan	0.374	0.363	0.347	0.34	0.334
23	Kalimantan Timur	0.319	0.314	0.333	0.342	0.335
24	Sulawesi Utara	0.356	0.388	0.394	0.372	0.376
25	Sulawesi Tengah	0.415	0.372	0.345	0.317	0.33
26	Sulawesi Selatan	0.386	0.409	0.429	0.388	0.391
27	Sulawesi Tenggara	0.411	0.395	0.404	0.392	0.393
28	Gorontalo	0.391	0.402	0.405	0.417	0.41
29	Maluku	0.328	0.388	0.321	0.326	0.32
30	Maluku Utara	0.315	0.326	0.33	0.336	0.31
31	Papua	0.347	0.318	0.398	0.398	0.391
	Indonesia	0.419	0.409	0.391	0.384	0.38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat perkembangan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019 berfluktuasi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terjadi nilai ketimpangan tertinggi dengan indeks gini sebesar 0,419 persen. Namun fluktuasi ini tidak diikuti oleh peningkatan kriminalitas di Indonesia, karena pada tahun 2015 jumlah kriminalitas di Indonesia turun menjadi 140 ribu jiwa. Sedangkan tahun 2019 saat ketimpangan pendapatan mengalami indeks gini terendah yaitu sebesar 0,380 persen, jumlah kriminalitas justru meningkat menjadi 103 ribu jiwa dari tahun 2019. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Wulansari, 2017), bahwa distribusi ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia karena ketimpangan pendapatan bukanlah variabel utama yang mendorong tingkat kriminalitas. Pada tahun 2019 Tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,428 hal ini diduga disebabkan oleh ketimpangan antara desa dan kota karena rasio gini dikota naiknya lebih tinggi di kota daripada di desa dan perekonomian lesu sehingga ketimpangan tidak merata. Ketimpangan pendapatan terendah terjadi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,262 hal ini disebabkan tingkat pemerataan ekonomi cukup baik sehingga ketimpangan pendapatan menjadi rendah, semakin rendah ketimpangan pendapatan maka jurang kesenjangan pendapatan kaya dan miskin semakin kecil dan terus menurun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul

“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama terhadap kriminalitas di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia.
2. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia.
3. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia.
4. Pengaruh tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama terhadap kriminalitas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pemerintah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi kriminalitas di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang memiliki hubungan serupa.